

Integrasi sebagai wacana teoritis dalam kajian sosial politik Indonesia

Abdul Aziz Maftuh¹, Moh. Kamilus Zaman²

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: abdulazizmaftuh16@gmail.com

Kata Kunci:

integrasi sosial; teori sosial;
kewarganegaraan; pluralisme;
politik identitas

Keywords:

social integration; social
theory; citizenship; pluralism;
identity politics

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji integrasi sosial sebagai wacana teoretis dalam kajian sosial politik Indonesia. Permasalahan utama penelitian ini adalah dominannya penggunaan istilah “integrasi” secara normatif tanpa landasan konseptual yang memadai, sehingga kebijakan integrasi sering gagal menyentuh akar ketimpangan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka untuk memetakan teori-teori integrasi seperti fungsionalisme, konflik, pluralisme, multikulturalisme, dan kewarganegaraan kritis. Analisis dilakukan melalui penyusunan

sintesis teoretis untuk melihat relevansi tiap pendekatan dalam konteks keindonesiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi merupakan proses dinamis yang menyangkut relasi kekuasaan, pengakuan identitas, distribusi sumber daya, serta partisipasi warga. Oleh karena itu, integrasi yang efektif harus menggabungkan nilai bersama, keadilan sosial, pengakuan budaya, dan ruang publik yang inklusif. Kesimpulannya, integrasi tidak dapat dicapai melalui pendekatan asimilatif, melainkan melalui strategi multidimensi berbasis keadilan sosial.

ABSTRACT

This paper examines social integration as a theoretical discourse within the socio-political context of Indonesia. The main issue addressed is the normative use of the term “integration” without a sufficient conceptual foundation, resulting in public policies that fail to address structural inequalities. This study employs a descriptive qualitative approach through library research to map theoretical frameworks on integration, including functionalism, conflict theory, pluralism, multiculturalism, and critical citizenship. The analysis synthesizes these frameworks to evaluate their relevance to Indonesian society. Findings indicate that integration is a dynamic process involving power relations, identity recognition, resource distribution, and civic participation. Therefore, effective integration must combine shared values, social justice, cultural recognition, and inclusive public spaces. The study concludes that meaningful integration cannot rely on assimilationist approaches but requires multidimensional strategies rooted in social justice.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan atau menjadi sumber disintegrasi, tergantung bagaimana pola pengelolaannya. Dalam wacana kebijakan, istilah integrasi sering muncul sebagai respons terhadap fragmentasi sosial atau konflik identitas. Namun, istilah integrasi sering dipakai secara normatif dan dangkal, tanpa pemahaman teoretis yang memadai. Akibatnya, kebijakan integrasi berjalan tidak efektif, hanya menekankan slogan persatuan tetapi mengabaikan ketimpangan struktural. Integrasi sosial, dalam kajian ilmu sosial, bukanlah konsep tunggal. Ia dipengaruhi oleh cara pandang teoretis, seperti fungsionalisme yang menekankan harmoni, teori konflik yang melihat dominasi, pluralisme yang



menekankan pengakuan perbedaan, dan kewarganegaraan kritis yang menyoroti partisipasi warga dalam ruang publik. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah ulang konsep integrasi dalam kerangka teoretis agar implementasi kebijakan integrasi di Indonesia lebih kontekstual dan adil. Penelitian ini bertujuan memetakan teori-teori integrasi serta menilai relevansinya terhadap konteks sosio-politik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual bagi strategi integrasi yang lebih reflektif dan multidimensional.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan melalui penelaahan literatur akademik, baik buku teori sosiologi dan politik maupun artikel jurnal nasional dan internasional. Teknik analisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan gagasan utama dalam teori-teori integrasi.

Hasil dan pembahasan

Meskipun 3.1 Dimensi Integrasi Sosial Integrasi sosial memiliki banyak dimensi:

1. Dimensi Normatif, Menekankan nilai dan norma bersama sebagai pedoman sosial.
2. Dimensi Struktural, Mengacu pada akses setara terhadap institusi seperti pendidikan, ekonomi, dan politik.
3. Dimensi Fungsional, Menggambarkan sejauh mana kelompok berbeda dapat bekerja sama
4. Dimensi Afektif, Menekankan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap komunitas atau bangsa.
5. Dimensi Identitas, Menekankan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan identitas kelompok.

Teori Fungsionalisme

Durkheim dan Parsons menekankan bahwa masyarakat adalah sistem yang saling terkait. Integrasi terjadi ketika nilai bersama diinternalisasi oleh warga. Namun, pendekatan ini dikritik karena terlalu menekankan stabilitas dan mengabaikan ketimpangan sosial.

Teori Konflik

Menurut Marx, struktur sosial dibentuk oleh relasi kekuasaan dan pertentangan kelas. Integrasi sering menjadi alat ideologis untuk mempertahankan dominasi. Coser menambahkan bahwa konflik dapat memperkuat solidaritas internal jika dikelola secara konstruktif. Pendekatan konflik relevan bagi Indonesia, terutama dalam memahami isu ketimpangan, marginalisasi etnis, dan polarisasi politik.

Teori Pluralisme dan Multikulturalisme

Pluralisme menghargai keberagaman identitas tanpa menghilangkannya. Multikulturalisme memperkuat pluralisme dengan memberikan hak kolektif kepada

kelompok minoritas. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi membutuhkan implementasi kebijakan afirmatif yang nyata.

Kewarganegaraan Kritis

Habermas menekankan pentingnya ruang publik deliberatif untuk mencapai integrasi melalui komunikasi bebas dari dominasi. Fraser menekankan dua aspek keadilan: redistribusi dan pengakuan. Integrasi terjadi ketika semua warga memiliki akses setara terhadap hak dan representasi politik.

Integrasi dalam konteks Indonesia

Sejarah Integrasi Indonesia

Orde Baru menggunakan integrasi top-down bersifat asimilatif. Reformasi membuka ekspresi identitas, tetapi juga memunculkan tantangan seperti intoleransi dan sektarianisme.

Tantangan Integrasi Modern

Beberapa masalah utama:

- a. Polarisasi politik
- b. Ketimpangan ekonomi
- c. Intoleransi beragama
- d. Representasi politik yang timpang

Integrasi sebagai Proses Dinamis

Integrasi harus dibangun melalui dialog, pengakuan identitas, dan kebijakan berbasis keadilan sosial.

Konteks sosial politik Indonesia

Membicarakan integrasi sosial dalam konteks Indonesia tidak bisa dilepaskan dari realitas historis, politik, dan sosiokultural bangsa ini. Dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.300-an etnis, dan 700 lebih bahasa daerah, Indonesia adalah salah satu negara paling majemuk di dunia. Namun, kemajemukan ini tidak serta-merta menghasilkan integrasi sosial yang utuh. Sebaliknya, sejarah Indonesia justru diwarnai oleh ketegangan antara semangat persatuan dan tantangan disintegrasi

Sejarah dan Politik Integrasi di Indonesia

Sejak masa kemerdekaan, negara Indonesia membangun identitas nasional melalui slogan “Bhinneka Tunggal Ika” dan Pancasila sebagai dasar ideologi. Namun dalam praktiknya, pendekatan integrasi nasional sering bersifat **sentralistik dan koersif**, terutama pada masa Orde Baru. Pemerintah pusat menetapkan definisi tunggal tentang nasionalisme, budaya, dan agama yang dianggap “resmi”, sementara identitas lokal kerap ditekan demi stabilitas politik. Contoh yang paling nyata adalah kebijakan represi terhadap ekspresi kultural dan politik lokal, seperti di Aceh, Papua, dan Timor Timur (sebelum merdeka). Negara memaknai integrasi sebagai keseragaman, bukan keberagaman yang diakui. Pendekatan ini sejalan dengan teori fungsionalisme—menekankan keteraturan dan stabilitas—namun mengabaikan tuntutan keadilan dan representasi.

Integrasi Pasca-Reformasi: Dari Asimilasi ke Pengakuan?

Era reformasi 1998 membuka ruang demokratisasi dan ekspresi identitas yang lebih luas. Otonomi daerah memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah lokal untuk mengelola wilayah dan identitas mereka. Namun, keterbukaan ini juga menghadirkan tantangan baru: konflik identitas, polarisasi politik, dan kebangkitan politik sektarian. Dalam konteks ini, integrasi di Indonesia sedang berada dalam proses negosiasi ulang. Pendekatan multikultural dan kewarganegaraan kritis menjadi relevan, karena masyarakat menuntut:

1. Pengakuan atas identitas budaya dan agama yang beragam.
2. Keadilan dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan.
3. Partisipasi politik yang lebih representatif dan inklusif.

Namun sayangnya, kebijakan negara belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan ini. Masih banyak kasus intoleransi, diskriminasi hukum, dan pengabaian terhadap aspirasi kelompok marjinal, yang menunjukkan lemahnya integrasi substantif.

Disintegrasi Sosial: Gejala dan Pemicu

Beberapa gejala disintegrasi sosial yang mengemuka di Indonesia saat ini antara lain:

1. Polarisasi politik yang tajam dalam pemilu dan media sosial, seringkali disertai narasi identitas.
2. Intoleransi beragama yang meningkat di tingkat akar rumput maupun dalam kebijakan publik.
3. Ketimpangan ekonomi regional yang menimbulkan rasa ketidakadilan struktural, terutama di kawasan timur Indonesia.
4. Stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, seperti etnis minoritas, komunitas LGBTQ, atau kelompok adat.

Gejala-gejala ini menegaskan bahwa integrasi sosial bukan hanya soal simbol atau slogan nasionalisme, tetapi sangat bergantung pada keadilan dalam pengakuan, redistribusi, dan representasi.

Menuju Integrasi yang Kritis dan Inklusif

Agar integrasi di Indonesia bersifat tahan lama dan bermakna, maka:

1. Pendekatan asimilatif harus ditinggalkan, diganti dengan multikulturalisme berbasis kewarganegaraan.
2. Negara harus aktif membangun ruang dialog dan partisipasi yang setara bagi semua warga.
3. Pendidikan kewarganegaraan perlu diarahkan ke pendekatan kritis dan reflektif, bukan sekadar hafalan ideologi negara.
4. Kebijakan integrasi harus berbasis data, inklusif, dan responsif terhadap dinamika identitas dan kebutuhan sosial lokal.

Artinya, teori-teori seperti pluralisme, kewarganegaraan kritis, dan bahkan versi moderat dari teori konflik dapat menjadi dasar konseptual untuk merancang model integrasi sosial yang lebih adil, partisipatif, dan berjangka panjang.

Strategi integrasi dalam perspektif teoritis

Setelah meninjau berbagai teori sosial dan menerapkannya dalam konteks Indonesia, menjadi jelas bahwa integrasi sosial tidak dapat dicapai dengan satu pendekatan tunggal. Sebaliknya, strategi integrasi yang efektif harus bersifat komprehensif, adaptif, dan berbasis keadilan sosial. Strategi tersebut perlu menggabungkan elemen stabilitas (dari fungsionalisme), kesadaran terhadap ketimpangan (dari teori konflik), pengakuan terhadap keberagaman (dari pluralisme dan multikulturalisme), serta partisipasi aktif warga negara (dari pendekatan kewarganegaraan kritis). Berikut ini beberapa strategi integrasi yang dapat diturunkan dari masing-masing perspektif teoretis dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia:

Penguatan Konsensus Nilai Bersama

Dari pendekatan fungsionalisme, strategi pertama adalah memperkuat kesepakatan atas nilai-nilai dasar kebangsaan seperti keadilan, toleransi, gotong royong, dan hak asasi manusia. Ini dilakukan melalui:

1. Pendidikan nilai yang kontekstual dan aplikatif, bukan dogmatis.
2. Penanaman Pancasila yang kritis dan dialogis.
3. Forum lintas komunitas yang mempromosikan kesadaran kolektif. Namun, strategi ini harus dijalankan dengan tetap membuka ruang kritik, agar tidak berubah menjadi alat homogenisasi paksa.

Reformasi Keadilan Sosial dan Ekonomi

Merujuk pada teori konflik, integrasi harus dibangun dengan memperbaiki ketimpangan struktural yang menjadi sumber disintegrasi. Strategi konkret meliputi:

1. Redistribusi sumber daya secara adil antarwilayah.
2. Kebijakan afirmatif untuk kelompok-kelompok marjinal.
3. Reformasi birokrasi agar akses terhadap layanan publik lebih setara.

Tanpa keadilan ekonomi dan sosial, retorika integrasi hanya akan menciptakan integrasi semu.

Pengakuan Identitas dan Budaya Lokal

Pendekatan pluralisme dan multikulturalisme mendorong pentingnya rekognisi terhadap keberagaman identitas, yang diwujudkan melalui:

1. Perlindungan hukum terhadap hak budaya dan bahasa daerah.
2. Kurikulum multikultural dalam pendidikan nasional.
3. Dukungan negara terhadap festival dan ekspresi budaya lokal.

Strategi ini harus disertai dengan penguatan nilai kebangsaan agar keberagaman tidak berubah menjadi segregasi.

Membangun Ruang Partisipasi dan Diskursus Publik

Dari perspektif kewarganegaraan kritis, strategi utama adalah memastikan bahwa setiap warga negara:

1. **Memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.**
2. **Didengar suara dan aspirasinya**, terutama kelompok rentan.
3. Dapat mengakses ruang publik yang bebas dari represi dan stigmatisasi.

Implementasi strategi ini dapat melalui:

1. Digitalisasi partisipasi publik yang inklusif.
2. Keterlibatan komunitas dalam perumusan kebijakan lokal.
3. Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat.

Integrasi sebagai Proses Dinamis dan Lokal

Integrasi tidak bisa diberlakukan secara top-down dan seragam. Ia harus bersifat **kontekstual**, dengan menyesuaikan strategi ke dalam kebutuhan lokal, misalnya:

1. Di Papua, integrasi bisa melalui pengakuan hak ulayat dan budaya lokal.
2. Di kota besar, integrasi bisa fokus pada hubungan antaragama dan antaretnis dalam ruang publik.

Negara sebaiknya berperan sebagai fasilitator, bukan pengatur tunggal dalam proses ini.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Integrasi sosial merupakan konsep yang kompleks dan multidimensi, yang tidak bisa dipahami hanya sebagai upaya penyatuan kelompok berbeda dalam masyarakat. Kajian teoritis terhadap integrasi menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan—baik itu fungsionalisme, konflik, pluralisme, maupun kewarganegaraan kritis—akan sangat memengaruhi cara pandang terhadap tujuan, mekanisme, dan dampak integrasi sosial itu sendiri. Dalam kerangka fungsionalisme, integrasi dilihat sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial melalui nilai-nilai bersama. Namun pendekatan ini kerap mengabaikan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Teori konflik justru melihat integrasi sebagai hasil dari dominasi atau negosiasi antar kelompok kepentingan, yang dapat mengarah pada disintegrasi jika tidak dikelola secara adil.

Pluralisme dan multikulturalisme menawarkan jalan tengah dengan mengakui pentingnya keberagaman identitas dan budaya dalam proses integrasi, sementara pendekatan kewarganegaraan kritis menekankan bahwa integrasi sejati hanya dapat dicapai bila semua warga memiliki akses yang adil terhadap pengakuan, partisipasi, dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia yang plural dan sarat ketimpangan, integrasi

tidak cukup didekati dengan pendekatan simbolik atau normatif. Diperlukan strategi integrasi yang berbasis keadilan distributif, pengakuan identitas, dan keterlibatan aktif warga dalam kehidupan sosial-politik.

Saran

1. Pengembangan Kebijakan Berbasis Teori, Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu merancang strategi integrasi sosial yang didasarkan pada pendekatan teoritis yang holistik, bukan sekadar retorika politik atau agenda stabilitas semata
2. Pendidikan Kewarganegaraan Kritis, Kurikulum pendidikan harus mendorong pemahaman kewarganegaraan yang reflektif, multikultural, dan partisipatif untuk membentuk warga yang mampu hidup bersama dalam keberagaman.
3. Pengakuan Identitas Lokal dan Minoritas, Negara harus menjamin pengakuan terhadap kelompok-kelompok identitas yang selama ini termarginalisasi dan menyediakan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak budaya mereka.
4. Penguatan Ruang Publik Inklusif, Dibutuhkan forum dan media yang mempertemukan beragam suara warga secara setara tanpa ancaman represi, agar integrasi tidak dipaksakan, melainkan dibangun bersama melalui dialog.
5. Riset Lanjutan yang Kontekstual, Para akademisi dan peneliti diharapkan terus mengembangkan studi integrasi sosial dengan fokus pada konteks lokal dan dinamika sosial-politik terkini, guna memperkuat basis pengetahuan dan kebijakan yang responsif

Daftar Pustaka

- Abbas, N., Nazuk, A., Tahir, F., & Makki, M. (2023). Horizontal inequalities, sectarian identities, and violent conflict: The case of Gilgit-Baltistan, Pakistan. *Contemporary Islam*, 17(1), 133–156. <https://doi.org/10.1007/s11562-023-00517-w>
- Blair, R. A., & Sambanis, N. (2021). Is Theory Useful for Conflict Prediction? A Response to Beger, Morgan, and Ward. *Journal of Conflict Resolution*, 65(7–8), 1427–1453. <https://doi.org/10.1177/00220027211026748>
- Blau, P. M. (1960). A Theory of Social Integration. *American Journal of Sociology*, 65(6), 545–556. <https://doi.org/10.1086/222785>
- Deitelhoff, N., & Schmelzle, C. (2023a). Social Integration Through Conflict: Mechanisms and Challenges in Pluralist Democracies. *KZfSS Kölner Zeitschrift Für Soziologie Und Sozialpsychologie*, 75(S1), 69–93. <https://doi.org/10.1007/s11577-023-00886-3>
- Deitelhoff, N., & Schmelzle, C. (2023b). Social Integration Through Conflict: Mechanisms and Challenges in Pluralist Democracies. *KZfSS Kölner Zeitschrift Für Soziologie Und Sozialpsychologie*, 75(S1), 69–93. <https://doi.org/10.1007/s11577-023-00886-3>
- Diggins, J. P., & Coser, L. A. (1985). Refugee Scholars in America: Their Impact and Their Experiences. *The Journal of American History*, 72(1), 187. <https://doi.org/10.2307/1903816>

- Fischer, A. M. (2020). The Dark Sides of Social Policy: From Neoliberalism to Resurgent Right-wing Populism. *Development and Change*, 51(2), 371–397. <https://doi.org/10.1111/dech.12577>
- Galtung, J. (1968). A Structural Theory of integration. *Journal of Peace Research*, 5(4), 375–395. <https://doi.org/10.1177/002234336800500404>
- Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. *Psychology of Popular Media Culture*, 8(3), 207–217. <https://doi.org/10.1037/ppm0000185>
- Guclu, I. (2019). Social Change and Development: A Critical Comparison of Classical with Contemporary Sociological Theory. *Studies in Asian Social Science*, 6(2), 66. <https://doi.org/10.5430/sass.v6n2p66>
- Hamdi, A. Z. (2019). *Identitas, Pluralisme, dan Tantangan Integrasi Sosial*. UIN Malang Repository. <https://repository.uin-malang.ac.id/4562/>
- HOMO SOCIOLOGICUS. (2017). *KzfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 69(S1), 159–214. <https://doi.org/10.1007/s11577-017-0413-x>
- Jensen, C. S. (2019). 4. Neo-functionalism. In C. S. Jensen, *European Union Politics* (pp. 55–68). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198806530.003.0004>
- Joppke, C. (2007). Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity. *Citizenship Studies*, 11(1), 37–48. <https://doi.org/10.1080/13621020601099831>
- Kim, M. C. (2022). Conflict and Social Integration of Korean Society. *Social Integration Research*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/10.46907/sir.2022.3.1.1>
- Kirmayer, L. J. (2019). The Politics of Diversity: Pluralism, Multiculturalism and Mental Health. *Transcultural Psychiatry*, 56(6), 1119–1138. <https://doi.org/10.1177/1363461519888608>
- Levey, G. B. (2022). Multiculturalism and Controversial Minority and Majority Practices. *Philosophia*, 50(5), 2333–2346. <https://doi.org/10.1007/s11406-022-00518-8>
- Liang, G. (2024). The Theoretical Connotation and Integration of the Second Integration in the Perspective of Social Viewpoint. *Communications in Humanities Research*, 48(1), 18–30. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/48/20240183>
- Mavridis, D. (2015). Ethnic Diversity and Social Capital in Indonesia. *World Development*, 67, 376–395. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.10.028>
- Morris, M. W. (2014). Values as the Essence of Culture: Foundation or Fallacy? *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 45(1), 14–24. <https://doi.org/10.1177/0022022113513400>
- Ormerod, R. (2020). The history and ideas of sociological functionalism: Talcott Parsons, modern sociological theory, and the relevance for OR. *Journal of the Operational Research Society*, 71(12), 1873–1899. <https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1640590>

- Parsons, T. (2009). Několik problémů, jimž čelí sociologie jako profese. *Teorie Vědy / Theory of Science*, 30(3–4), 201–232. <https://doi.org/10.46938/tv.2008.5>
- Putra, H. (2021). From Pluralism to Multiculturalism: Challenges in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Seminar on Cultural Sciences, ISCS 2020, 4 November 2020, Malang, Indonesia*. 1st International Seminar on Cultural Sciences, ISCS 2020, 4 November 2020, Malang, Indonesia, Malang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2020.2308923>
- Sa'dan, M. (2020). *Kebijakan Multikultural dalam Pendidikan Islam*. UIN Malang Repository. <https://repository.uin-malang.ac.id/7540/>
- Safdar, S., Chahar Mahali, S., & Scott, C. (2023). A critical review of multiculturalism and interculturalism as integration frameworks: The case of Canada. *International Journal of Intercultural Relations*, 93, 101756. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2023.101756>
- Siddiq, A. (2022). PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH DAN KH. ALI YAFIE TENTANG RELASI MAYORITAS-MINORITAS DI INDONESIA. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.2857>
- Smith, D. V., Gseir, M., Speer, M. E., & Delgado, M. R. (2016). Toward a cumulative science of functional integration: A meta-analysis of psychophysiological interactions. *Human Brain Mapping*, 37(8), 2904–2917. <https://doi.org/10.1002/hbm.23216>
- Teasdale, S., & Dey, P. (2019). Neoliberal governing through social enterprise: Exploring the neglected roles of deviance and ignorance in public value creation. *Public Administration*, 97(2), 325–338. <https://doi.org/10.1111/padm.12588>
- Thompson, M. J. (2013). A functionalist theory of social domination. *Journal of Political Power*, 6(2), 179–199. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2013.805922>
- Ulung Napitu, Opan S. Suwartapradja, Budi Radjab, & Junardi Harahap. (2020). Challenges and Its Approaches to Bring Integration of Indonesian People. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal*, 2(2), 381–391. <https://doi.org/10.33258/biohs.v2i2.236>
- Van Mourik Broekman, A., Gordijn, E. H., Koudenburg, N., & Postmes, T. (2018). Reshaping social structure through performances: Emergent solidarity between actors and observers. *Journal of Experimental Social Psychology*, 76, 19–32. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.12.002>
- Wahyono, S. B. (2020). Disintegration from Within and Open Indonesian Identity. *Antropologi Indonesia*, 41(1), 7–24. <https://doi.org/10.7454/ai.v41i1.12655>
- Ward, C., Gale, J., Staerklé, C., & Stuart, J. (2018). Immigration and Multiculturalism in Context: A Framework for Psychological Research. *Journal of Social Issues*, 74(4), 833–855. <https://doi.org/10.1111/josi.12301>
- Yaqin, A. (2018). *Multikulturalisme dan Pendidikan Agama di Indonesia*. UIN Malang Repository. <https://repository.uin-malang.ac.id/3190/>

- Zhang, P., Wei, X., & Mao, G. (2024). Cultural diversity, social integration, and migrant entrepreneurship—Evidence from the China migrants dynamic survey. *Small Business Economics*, 62(3), 1135–1155. <https://doi.org/10.1007/s11187-023-00791-1>
- Zhu, Y., Zhang, L., Zhou, X., Li, C., & Yang, D. (2021). The impact of social distancing during COVID-19: A conditional process model of negative emotions, alienation, affective disorders, and post-traumatic stress disorder. *Journal of Affective Disorders*, 281, 131–137. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.004>